



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1142 /SEK/KU.00/08/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan dan
Permintaan Dokumen

28 Agustus 2018

- Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
 3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
 5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
 6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
 7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
 8. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
 9. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
 10. Ketua Pengadilan Negeri Bandung
 11. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
 12. Ketua Pengadilan Negeri Sampang
 13. Ketua Pengadilan Agama Sampang

Sehubungan dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 192/ST/V-XVI.1/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan Belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur (surat tugas terlampir) dan surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 01/PDPTT-MA/08/2018 tanggal Agustus 2018 hal seperti pada pokok surat (surat terlampir), dengan ini diminta untuk memenuhi permintaan dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran pemeriksaan tersebut.

Berkaitan dengan penyerahan dokumen pemeriksaan, mohon berkomunikasi dan berkoordinasi secara langsung dengan Tim Pemeriksa BPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI


A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

SURAT TUGAS

Nomor: 192 /ST/V-XVI.1/08/2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan memberi tugas kepada:

No.	Nama	Jabatan	Waktu
1.	Blucer W. Rajagukguk	Penanggung Jawab	5 hari
2.	Hery Ridwan	Wakil Penanggung Jawab	10 hari
3.	Ketut Arya	Pengendali Teknis	15 hari
4.	Rio Andalas Soekotjo	Ketua Tim	40 hari
5.	Christanto H. Wibowo	Ketua Sub Tim	40 hari
6.	Alexander	Ketua Sub Tim	40 hari
7.	Reto Aditya	Anggota Tim	40 hari
8.	Indri Gatari Mauludin	Anggota Tim	40 hari
9.	Bonny Eka Putra	Anggota Tim	40 hari
10.	Leony Hendrawan	Anggota Tim	40 hari
11.	Yusuf Agil Pamungkas	Anggota Tim	40 hari
12.	Lidya Soraya	Anggota Tim	40 hari
13.	Muhammad Fadly	Anggota Tim	40 hari

Untuk melakukan : Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga, dan Belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Jakarta, 21 Agustus 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ANGGOTA III,**



Achsanul Qosasi //

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung
2. Sekretaris Mahkamah Agung
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
4. Panitera Mahkamah Agung
5. Sekretaris Jenderal BPK
6. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK
7. Inspektur Utama BPK
8. Kepala Ditama Revbang BPK



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, Agustus 2018

Nomor : 01/PD TT-MA/08/2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen

**Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta**

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga, dan Belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur sesuai Surat Tugas Nomor 192/ST/V-XVI.1/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 (terlampir), kami beritahukan bahwa pelaksanaan tugas pemeriksaan selama 40 hari kerja dan dimulai pada tanggal 27 Agustus 2018.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen sebagai bagian dari proses pemeriksaan yang kami lakukan (terlampir). Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam lampiran surat ini akan kami mintakan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kami harapkan dokumen tersebut dapat disampaikan kepada kami paling lambat hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018. Selain itu, kami harapkan kehadiran Bapak dan unit kerja terkait pelaksanaan pertemuan awal (*entry meeting*) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,

Rio Andalas Soekotjo

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Urusan Administrasi MA
2. Panitera MA
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA
5. Kepala Badan Pengawasan MA
6. Penanggung Jawab
7. Pengendali Teknis

Lampiran 1

Rincian Satuan Kerja Uji Petik Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga, dan Belanja TA 2017 s.d Semester I TA 2018.

1. Jakarta
 - a. Kepaniteraan
 - b. Pengadilan Tinggi Jakarta
 - c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - d. Pengadilan Negeri Jakarta Timur
 - e. Pengadilan Negeri Jakarta Utara
 - f. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
2. Jawa Timur
 - a. Pengadilan Tinggi Surabaya
 - b. Pengadilan Negeri Surabaya
 - c. Pengadilan Negeri Sampang
 - d. Pengadilan Agama Sampang
3. Jawa Barat
 - a. Pengadilan Tinggi Bandung
 - b. Pengadilan Negeri Bandung

Data Umum Entitas (Hardcopy dan Softcopy)

1. SK Pengelola Anggaran (meliputi KPA, PPK, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran)
2. Daftar Pegawai/Bezetting (Posisi per 31 Des 2017 s.d 30 Juni 2018)
3. DIPA, RKA KL dan POK Tahun 2017 dan 2018 (pertama dan revisi terakhir)
4. Laporan Tahunan MA Tahun 2017
5. SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun dan SK Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Tahun 2017, beserta Dokumen Pendukungnya (disertai dengan sertifikat keahlian) untuk Tahun 2017 dan 2018
6. Surat Keputusan (SK) Penerima Barang/Jasa Tahun 2017 dan 2018
7. Surat Keputusan kepanitiaan/kegiatan Tahun 2017 dan 2018

Dokumen Keuangan (Hardcopy dan Softcopy)

1. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018
2. Laporan Realisasi s.d 30 Juni 2018 (meliputi realisasi keseluruhan, per jenis belanja, per kegiatan)
3. Berita Acara Rekonsiliasi SAIBA bulanan dan triwulanan Tahun 2018
4. Backup data ADK SAS dan SAIBA Tahun 2018 (sampai dengan data terakhir)
5. Daftar Rincian SPM dan SP2D Tahun 2018 beserta dokumen bukti pertanggungjawaban belanja
6. User ID dan *password login* pada Komdanas Mahkamah Agung

Belanja Modal (Hardcopy dan Softcopy)

1. Rencana umum pengadaan Tahun 2017 dan 2018
2. Daftar Pengadaan Barang/Jasa (meliputi pelelangan/pengadaan langsung/penunjukkan langsung)
3. Rekapitulasi data kontrak belanja barang/jasa/modal (yang didaftarkan pada KPPN)
4. Rincian realisasi Belanja Modal Tahun 2017 dan 2018. Untuk masing-masing dokumen kontrak:
 - a. Dokumen lelang/pengadaan langsung/penunjukkan langsung/seleksi sederhana
 - b. Dokumen pengadaan
 - c. Dokumen Penawaran Pemenang I, II, III
 - d. HPS atau OE
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - f. Analisa perhitungan harga satuan
 - g. Surat-surat Jaminan Pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan Uang Muka
 - h. Dokumen pembayaran (SPM)
 - i. SP2D Asli dan dokumen pendukungnya.
 - j. Surat Penunjukan Pemenang
 - k. SPMK
 - l. Kontrak, Addendum dan Justifikasi Teknik
 - m. Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian
 - n. *Back Up Data Quality* dan *Quantity*
 - o. Gambar Perencanaan (*shop drawing*)

- p. Gambar Terpasang (*as built drawing*)
 - q. Foto dokumentasi 0% s.d posisi terakhir
 - r. Berita Acara Pemeriksaan Fisik
 - s. Berita Acara Pembayaran
 - t. BA Serah Terima, PPIO dan FHO
5. User ID dan password untuk akses LPSE MA bagi Pemeriksa.
 6. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Revaluasi Tahun 2017 beserta dokumen pendukung penyiapan data awal yang dinilai.

Bendahara Pengeluaran (Hardcopy dan Softcopy)

1. BKU dan Buku Pembantu Tahun 2017 dan 2018 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta BA Pemeriksaan Kas oleh PPK Tahun 2017 dan 2018
3. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Tahun 2017 dan 2018
4. Buku Panjar
5. Surat Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018
6. Register Pajak Penghasilan 22 (PPh 22) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas kegiatan pengadaan Belanja Modal dan Barang

Bendahara Penerimaan (Hardcopy dan Softcopy)

1. Rekening Koran Bendahara Penerimaan Tahun 2017 dan Tahun 2018
2. BKU Bendahara Penerimaan Tahun 2017 dan 2018
3. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan BA Pemeriksaan Kas oleh PPK Tahun 2017 dan 2018
4. Rekapitulasi SSBP Tahun 2017 dan 2018 beserta bukti pendukungnya
5. Dokumen pembukuan dan penyetoran PNPB oleh kasir/bendahara biaya proses kepada Bendahara Penerimaan Tahun 2017 dan Tahun 2018
6. Laporan bulanan PNPB dari pengadilan tingkat pertama kepada Badan Urusan Administrasi cq. Kepala Biro Keuangan dengan tembusannya kepada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2017 dan Tahun 2018

Biaya Proses Kepaniteraan dan Pengadilan Tingkat Banding (Hardcopy dan Softcopy)

1. SK Tim Pengelola Biaya Proses di Kepaniteraan, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2017 dan 2018
2. Peraturan mengenai penggunaan biaya proses di tingkat Kepaniteraan dan Pengadilan Tingkat Banding
3. Rencana Kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya Proses Tahun 2017 dan 2018
4. Laporan Keuangan Perkara Kepaniteraan, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2017 dan 2018
5. Buku Induk Keuangan Perkara, Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan (HHK), Jurnal Perkara Gugatan Tahun 2017 dan 2018
6. Rekening Koran Biaya Proses Tahun 2017 dan 2018 dan Surat Ijin Pembukaan Rekening dari Menteri Keuangan

7. Bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya proses Tahun 2017 dan 2018
8. Data perkara yang putus selama Tahun 2017 dan 2018

Biaya Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya pad Pengadilan Tingkat Pertama (Hardcopy dan Softcopy)

1. Laporan Keuangan Perkara Tahun 2017 dan Tahun 2018
2. Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya yang dihimpun dari seluruh Badan Peradilan di bawah MA per 30 Juni 2018
3. SK Ketua Pengadilan tentang Penetapan Besaran Biaya Panjar Perkara Tahun 2017 dan 2018
4. SK Ketua Pengadilan tentang Pengangkatan dan Penunjukkan Pengelola Biaya Perkara Tahun 2017 dan 2018
5. Rekening Koran Biaya Perkara periode Januari 2017 s.d September 2018 dan Surat Ijin Pembukaan Rekening dari Menteri Keuangan
6. Buku Induk Keuangan Perkara, Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan (HHK), Jurnal Perkara Gugatan, Jurnal Perkara Permohonan, Jurnal Perkara Banding, Jurnal Perkara Kasasi, Jurnal Perkara PK, Jurnal Perkara Eksekusi dan Jurnal Perkara Somasi
7. Laporan keadaan perkara Tahun 2017 dan 2018 (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 3**).
8. Rekapitulasi perkara di pengadilan tingkat pertama yang sisa panjar biaya perkaranya belum dikembalikan kepada pihak yang berperkara/belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 30 Juni 2018 (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 4**).
9. Total perkara eksekusi sampai dengan 30 Juni 2018 yang belum diperhitungkan sisa panjar biaya perkaranya dan belum dikembalikan ke pihak berperkara/ke kas negara (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 5**).

LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2017 DAN 2018

Pengadilan Tingkat Pertama

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
A	2017				
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)				
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama				
3	Eksekusi				
4	Perdata Tingkat Banding				
5	Perdata Tingkat Kasasi				
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali				
B	2018				
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)				
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama				
3	Eksekusi				
4	Perdata Tingkat Banding				
5	Perdata Tingkat Kasasi				
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali				

Jakarta, Agustus 2018
Ketua PN/PA

.....

